



**ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DI
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial
Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

JEMIMA DAYA BR PANJAITAN

2025100429

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS,
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KOTA MEDAN

NAMA : JEMIMA DAYA BR PANJAITAN
NPM : 2025100429
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 16 April 2024

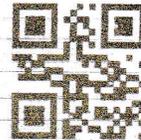
DIKETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.



Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si.



Dra. Mariyam, M.Si., Ak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : JEMIMA DAYA BR PANJAITAN
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 17-08-2000
NPM : 2025100429
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : JL. DANAU PANIAI GG. GEREJA LK. I

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



JEMIMA DAYA BR PANJAITAN

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jemima Daya Br Panjaitan
Npm : 2025100429
Fakultas /Program Studi : Sosial Sains / Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA BELANJA
DAERAH DI PEMERINTAH KOTA
MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensinya apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian haridiketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, Mei 2024

Jemima Daya Br Panjaitan

NPM: 2025100429

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran mengenai selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja, pertumbuhan belanja, analisis varians, analisis pertumbuhan belanja, rasio belanja modal, rasion efisiensi belanja, dan rasio anggaran belanja daerah terhadap PDRB. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, data yang digunakan adalah data skunder berupa rincian Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2021. Teknik analisis yang digunakan yaitu Analisis Varians Belanja Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja Daerah, Analisis Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB. Hasil penelitian menunjukkan analisis varians belanja selama tahun 2018-2021 termasuk kategori baik, kinerja keuangan melalui analisis pertumbuhan belanja selama 2018-2021 mengalami fluktuatif, analisis keserasian belanja termasuk kategori baik, rasio efisiensi belanja termasuk kedalam kategori cukup efisien, adanya pengaruh anggaran belanja daerah terhadap perubahan nilai PDRB.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Belanja Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of regional expenditures in the budget realization report regarding the difference between expenditure realization and the expenditure budget, expenditure growth, analysis of variance, analysis of expenditure growth, capital expenditure ratio, expenditure efficiency ratio, and the ratio of regional expenditure budget to PDRB. This research is a quantitative descriptive study, the data used is secondary data from Budget Realization Report of Medan City Government Regional Revenue Agency Period 2018-2021. Analysis of Regional Expenditure Efficiency, Ratio of Regional Expenditures to PDRB. The results of this study indicate that the results of the analysis of the spending variance during 2018-2021 is in the good category, financial performance through analysis of spending growth during 2018-2021 has fluctuated, the analysis of spending harmony is in the good category, the efficiency ratio of spending is included in the quite efficient category, the influence of the regional budget to changes in PDRB values.

Keywords: Regional Expenditure Financial Performance

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kinerja Belanja Daerah Di Pemerintah Kota Medan.**” dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini nantinya akan menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Sehingga bantuan dan bimbingan dari semua pihak sangat saya harapkan.

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE.,MM, Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si., CIQaR., CIQnR, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi,
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, dan selaku Dosen pembimbing 1 (satu) penulis dalam membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Dra. Mariyam, MSi., Ak., Selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan dalam penyusunan skripsi.
5. Kepada Ayahanda yang terkasih Ir. W.Z. Panjaitan dan Ibunda tercinta S.Br.Siburian, serta adik penulis Serda Sahalana Wijaya Panjaitan dan Jakobus

Murphy Panjaitan yang senantiasa memberi dukungan, motivasi, dan bantuan kepada penulis.

6. Kepada teman dan kepada sepupu penulis, Irma Lestari Sijabat dan Miranda Agita Sijabat dan sahabat penulis Santi Karolina yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, April, 2024
Penulis,

Jemima Daya Br. Panjaitan
NPM : 2025100429

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTARCT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	10
1.2.2 Batasan Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Tujuan Penelitian	11
1.4.2 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Signal (Signaling Theory)	14
2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah.....	15
2.1.3 Keuangan Pemerintah Daerah.....	17
2.1.4 Belanja Daerah.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28

2.3 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	33
3.2.2 Waktu Penelitian.....	33
3.3 Definisi Operasional	34
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Kota Medan.....	42
4.1.2 Visi dan Misi Kota Medan.....	44
4.1.3 Pemerintahan Kota Medan	42
4.1.4 Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	46
4.1.5 Penyajian Data.....	47
4.2 Pembahasan.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	34
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	35
Tabel 3.3 Kriteria Varians Belanja Daerah	39
Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja.....	39
Tabel 4.1 Analisis Varians Belanja Kota Medan	48
Tabel 4.2 Analisis Pertumbuhan Belanja Kota Medan	49
Tabel 4.3 Keserasian Belanja Daerah Kota Medan.....	50
Tabel 4.4 Rasio Efisiensi Belanja Modal	51
Tabel 5.3 Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Medan.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki suatu otonomi dalam mengelola perekonomian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan daerah. Keberadaan suatu daerah pasti memiliki otonomi daerah masing-masing, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Kemandirian pengelolaan keuangan daerah merupakan tujuan dari otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dari Undang-Undang No.25 tahun 1999. Otonomidaerah yang dilaksanakan pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam mengatur keuangannya yang sesuai dengan kepentingan daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Teori Sinyal (*Signalling Theory*) menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan signal kepada masyarakat. Pemerintah akan memberikan signal ke masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern, pengungkapan yang lebih lengkap. Sehingga pengelolaan keuangan daerah.

berjalan dengan optimal. Pemerintah daerah dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat (Puspita et al, 2010).

Belanja daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program (Halim *et al.*, 2021). Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Pengukuran kinerja adalah proses yang disusun untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan anggaran dan realisasi dalam suatu instansi dapat dilihat melalui seberapa besar pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan oleh instansi. Salah satunya dengan memperhatikan peningkatan masing-masing belanja, apakah peningkatan tersebut rasional dan dapat dipertanggung-jawabkan dengan baik atau tidak. Analisis Pertumbuhan Belanja dapat digunakan untuk mengukur kinerjanya. Pengukuran kinerja diawali dengan proses penentuan indikator kinerja untuk

memberikan informasi yang memadai sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk mengontrol kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam mengendalikan dan mengawasi kinerja dan berfokus pada tujuan pemerintah untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja belanja daerah dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja belanja daerah, pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD dengan ekonomis, dan sebaik mungkin, tidak mengeluarkan anggaran yang tidak diperlukan dan menghindari pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

Kota Medan sebagai salah satu kota di Sumatra Utara memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian Kota Medan digerakkan oleh sektor tersier dan sekunder

secara dominan yaitu sektor perdagangan/hotel/restoran, telekomunikasi dan transportasi, dan industri pengolahan yang dapat meningkatkan Belanja daerah.

Dan salah satu pendapatan terbesar Kota Medan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Jika kinerja keuangan Pemerintah Daerah sudah memenuhi kriteria ekonomi, efisiensi, dana efektif maka dapat meningkatkan pendapatan aslidaerah. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, terdapat metode analisis anggaran yang dapat digunakan salah satunya analisis belanja yaitu berupa Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja dan Rasio Efisiensi Belanja. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan telah mengupayakan pelaksanaan anggaran, yang sesuai dengan prosedur. Sehingga masyarakat tidak hanya dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan, tetapi juga pemerintah kota Medan berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada. Berikut ini adalah data pendukung dari Pemerintah Kota Medan yang diperoleh melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah kota Medan dan peneliti juga sudah merekap data berdasarkan laporan keuangan yang berhasil peneliti himpun dari tahun 2018 hingga tahun 2021, data tersebut adalah sebagai berikut:

**Table 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah
pada Pemerintah KotaMedan Periode 2018-2021**

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Presentase	Selisih
2018	5.451.085.765	4.215.003.353	77,32%	1.236.082.412
2019	6.304.555.945	5.060.725.686	80,27%	1.243.830.259
2020	5.254.667.074	3.854.742.410	73,35%	1.399.924.664
2021	5.731.395.062	4.499.145.144	78,50%	1.232.249.918

Sumber: Pemko Medan, 2022

Berdasarkan tabel 1.1, kita dapat melihat anggaran belanja daerah, realisasi, persentase dan juga selisih belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Medan dari tahun 2018-2021.

Tahun anggaran belanja daerah 2018 selisih anggaran belanja daerah dan realisasi sebesar Rp 1.236.082.412. Berbeda dengan tahun 2019 dimana anggaran belanja daerahnya naik sebesar Rp 6.304.555.945 dan realisasinya sebesar Rp 5.060.725.686 dengan presentase 80,27% sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp 1.243.830.259.

Tahun 2020 anggaran belanja daerah kembali turun sebesar Rp 5.254.667.074 dengan realisasi sebesar Rp 3.854.742.41 atau 73,35% dan selisihnya sebesar Rp 1.399.924.664, yang merupakan selisih paling besar. Pada tahun 2021 selisih anggaran belanja daerah dan realisasinya sebesar Rp 1.232.249.918. Jumlah anggaran belanja daerah yang tidak terealisasi dilihat dari persentasenya cukup besar dan nominalnya yang cukup signifikan. Dalam menentukan anggaran belanja daerah belanja, hendaknya memperhatikan penghematan yang dilakukan berdasarkan angka persentasi, tetapi juga nominalnya. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja Pemerintah Kota Medan yang ditetapkan tidak terealisasi secara menyeluruh karena realisasi yang dicapai lebih kecil dari yang dianggarkan. Dari data anggaran belanja Pemerintah Kota Medan dapat dilihat apakah anggaran dan realisasi belanja menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan kinerja yang telah dicapai. Oleh sebab itu perlu suatu metode perhitungan untuk melihat sejauh mana

kinerja realisasi anggaran belanja daerah dalam belanja yang dilakukan oleh Pemkot Medan selama kurun waktu 2018-2021.

Penelitian ini menekankan pada analisis kinerja belanja daerah. Analisis yang merupakan suatu sistem pengukuran hasil dari pengeluaran kas umum daerah dimana mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu periode pelaporan. Belanja daerah menurut Hifni (2018) bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kinerja belanja daerah berfokus pada interaksi strategis pemerintah daerah, yang telah memberikan landasan teori dan metode analisis untuk kegiatan pembelanjaan daerah hal ini disampaikan (Pan et al., 2020). Dalam penelitian Idris et al., (2019) mengatakan bahwa “analisis kinerja belanja berguna mengetahui seberapa besar pemerintah daerah mampu mencapai realisasi anggaran yang pada awal tahun anggaran telah ditetapkan atau direncanakan dan seberapa besar pertumbuhannya” Untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya antara lain dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Transparansi dalam mengelola keuangan daerah akan memberikan informasi yang aktual dan faktual kepada publik, kemudian partisipasi publik/masyarakat sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, serta akuntabilitas merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan informasi sebagai pemenuhan hak-hak publik. Dalam penyusunan laporan keuangan harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dapat mencapai *good governance*. Terkait dengan standar akuntansi ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah

dalam menyajikan laporan keuangan.

Analisis belanja daerah menurut Saputra et all (2019) merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran dalam membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja dibagi menjadi beberapa analisis. Pertama, Analisis varians belanja menurut Saputra et all (2019) merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu selisih yang disukai (*favourable variance*) dan selisih yang tidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut *favourable variance* dan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka disebut *unfavourable variance*.

Kedua, Analisis Pertumbuhan Belanja Menurut Saputra et all (2019) merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. Ketiga, Analisis keserasian belanja menurut Saputra et all (2019) adalah keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar

fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja melalui indikator analisis belanja operasi terhadap total belanja dan analisis belanja modal terhadap total belanja

Keempat, Rasio efisiensi belanja menurut Saputra et all (2019) merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tapi relatif. Artinya tidak ada standart baku yang dianggap baik untuk rasio ini, hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasi telah terjadi pemborosan anggaran.

Kinerja menurut Fasha (2022) Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Permasalahan yang timbul pada anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Daerah Kota Medan mengalami perubahan yang fluktuatif pada tahun 2018 – 2021 hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan Pemerintah Daerah Kota Medan mengalami defisit anggaran dan harus memangkas anggaran belanja daerahnya, tetapi hal ini belum dapat menjelaskan apakah dengan menurunnya realisasi belanja tersebut kinerja belanja yang dilaksanakan dapat berjalan baik atau sebaliknya. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk analisis laporan keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan Belanja Daerah dilakukan dengan menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Dan

Mahmudi (2019:154) menjelaskan belanja daerah tersebut bisa dianalisis menggunakan analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, rasio efisiensi belanja, dan rasio belanja terhadap PDRB.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, Belanja Daerah sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya. Maka untuk itu pemerintah harus mengetahui apakah dana yang digunakan Pemerintah Kota Medan sebagai belanja daerah dapat memperbaiki prasarana dan sarana seperti infrastruktur dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan menciptakan investasi yang optimal sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sehingga diperlukan pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio belanja daerah terhadap PDRB yang berpengaruh terhadap PDRB dalam harga konstan pada pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Riska (2021) menyatakan bahwa jika realisasi belanja lebih kecil dari jumlah anggaran maka kinerja pemerintah daerah dinilai baik, sebaliknya apabila realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka kinerja anggaran dikatakan kurang baik. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti terkait kinerja belanja yang dianalisis melalui metode analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi dalam mengetahui kinerja belanja Pemerintah Kota Medan dalam mengelola anggaran belanja daerah 2018 – 2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan mengambil judul: **“Analisis Kinerja Belanja Daerah di**

Pemerintah Kota Medan”

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Terjadinya Fluktuasi Realisasi Belanja Daerah mulai periode tahun 2018 sampai 2021 di Pemerintah Kota Medan.
2. Realisasi selalu lebih rendah dari target anggaran yang telah direncanakan.
3. Terjadinya fluktuasi Realisasi Belanja Daerah terhadap PDRB mulai periode 2018 sampai 2021 di Pemerintah Kota Medan.

1.2.2 Batasan Masalah

Penelitian ini memberikan pemahaman sesuai dengan tujuan penulis, sehingga dilakukan pembatasan terhadap Penilaian kinerja keuangan yaitu dalam Belanja daerah dengan rasio keuangan yaitu analisis varians belanja daerah, analisis Pertumbuhan belanja daerah, analisis keserasian belanja daerah, Rasio efisiensi belanja daerah dan rasio belanja daerah terhadap PDRB dalam harga konstan tahun 2018-2021 di Pemerintah Kota Medan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja belanja daerah diukur dari Analisis varians belanja daerah di Pemerintah Kota Medan?
2. Bagaimana kinerja belanja daerah diukur dari Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah di Pemerintah Kota Medan ?
3. Bagaimana kinerja belanja daerah diukur dari Analisis Keserasian Belanja

Daerah di Pemerintah Kota Medan ?

4. Bagaimana kinerja belanja daerah diukur dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah di Pemerintah Kota Medan ?
5. Bagaimana Kinerja belanja daerah diukur dari Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB Pada Pemerintah Kota Medan ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kinerja belanja daerah diukur dari analisis varians belanjadaerah di Pemerintah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui kinerja belanja daerah diukur dari Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah di Pemerintah Kota Medan.
3. Untuk mengetahui kinerja belanja daerah diukur dari Analisis Keserasian Belanja Daerah di Pemerintah Kota Medan.
4. Untuk mengetahui kinerja belanja daerah diukur dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah di Pemerintah Kota Medan.
5. Untuk mengetahui kinerja belanja daerah diukur dari rasio belanja daerah terhadap PDRB dalam harga konstan di pemerintah kota medan

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian dapat bermanfaat karena bisa menambah wawasan mengenai kinerja anggaran dalam belanja yang ada pada Kota Medan.

2. Bagi penelitian lain, bermanfaat untuk menjadi bahan acuan bagi yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, serta memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus mengenai analisis kinerja anggaran belanja.
3. Bagi instansi, bisa memberikan saran dalam menentukan kebijaksanaan yang akan diambil dalam menentukan anggaran pada tahun yang akan datang dan mampu untuk menganalisis kelayakan suatu penyusunan anggaran yang telah ditetapkan.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai analisis kinerja anggaran belanja.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Riska (2020) yang berjudul “Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran pada badan pendapatan Daerah Kabupaten Wajo”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Kinerja Belanja Daerah Di Pemerintah Kota Medan”. Perbedaan penelitiannya terletak pada:

- a. Variabel Penelitian: Penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan 5 (Lima) variabel bebas yaitu yaitu analisis varians belanja daerah, analisis pertumbuhan belanja daerah, analisis keserasian belanja daerah, Analisis Efisiensi Belanja daerah dan Analisis rasio belanja daerah terhadap PDRB. Hal yang membedakannya terletak pada variabel terikat, dimana penelitian sebelumnya menggunakan variabel terikat yaitu Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel terikat yaitu Kinerja Belanja Daerah.

- b. Waktu penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2020 sedangkan penelitian ini tahun 2023
- c. Lokasi Penelitian: Lokasi penelitian terdahulu di Daerah Kabupaten Wajo, sedangkan penelitian ini di Provinsi Sumatera Utara.
- d. Data Penelitian: Penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2019-2020 sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2018-2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Signal (*Signaling Theory*) dalam Pemerintah

Teori signal adalah teori yang menjelaskan mengenai alasan pemerintah memiliki motivasi untuk memperlihatkan signal kepada masyarakat. Pemerintah memberikan signal kepada masyarakat karena adanya ketidak selarsan informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Ketidak selarsan informasi terjadi karena pemerintah memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan masyarakat mengenai perputaran dalam pemerintahan. Perjanjian pinjaman seringkali menentukan tingkat rasio seperti rasio utang terhadap ekuitas dan pelanggaran terhadap tingkat rasio maksimum tersebut akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan teknis. Semakin dekat batasan utang terhadap ekuitas, semakin mungkin manajemen akan memilih alternatif akuntansi yang akan meningkatkan *income*. Dalam hal kontrak kompensasi manajemen, manajemen berupaya memilih metode yang meningkatkan *income* dan juga bonus. Oleh karena itu, pemilihan metode akuntansi oleh perusahaan dipengaruhi oleh efek metode akuntansi tersebut terhadap kontrak keagenan .

Wolk and Tearney, dalam Bestari (2013) mengungkapkan bahwa, “Denganteori signal, pemerintah memberikan signal kepada masyarakat dalam susunan informasi keuangan yang berkualitas, memadai dan dapat dipercaya serta pengungkapan dengan penjelasan yang lebih lengkap. Hal itu dilakukan agar pemerintah mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menjalankan

pemerintahan dengan baik. Kinerja pemerintahan tersebut perlu diketahui masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah maupun sebagai bentuk penawaran yang bertujuan unjuk hal politik. Hal positif dalam teori signal terlihat dengan kemampuan pemerintah memberikan informasi yang akurat, maka masyarakat dapat membedakan mereka dengan pemerintah lain yang tidak memiliki informasi yang baik dengan memberikan informasi tentang kondisi mereka". Dengan sinyal positif dari pemerintah, diharapkan bisa mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat karena hal tersebut dapat memberikan penilaian yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah.

Akuntansi berkaitan dengan dua signal, yaitu signal langsung dan signal tidak langsung. Signal langsung mencakup aliran kas pemerintah, sedangkan signal tidak langsung meliputi kebijakan keuangan, struktur modal, dan pemilihan kebijakan akuntansi. Pengungkapan langsung dapat menjadi signal yang bisa dipercaya dan dapat mengurangi adverse selection dalam pemerintahan.

2.1.2 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja sebagai kegiatan yang sistematis dari suatu entitas selama jangka waktu tertentu sebagai patokan dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan. Pengukuran kinerja adalah suatu tahapan yang

sistematis untuk menilai apakah program/ kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan.

Mohamad Mahsun (2012) berpendapat bahwa, “Kinerja merupakan gambaran tentang pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi”. Desi Agustina (2013) dalam jurnalnya juga mengemukakan bahwa “Kinerja Keuangan Daerah merupakan tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah yang mencakup penerimaan dan pengeluarandaerah dengan memanfaatkan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang- undangan selama satu periode anggaran. Wujud dari kinerja tersebut adalah rasio keuangan yang terlihat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD”. Halim (2013) berpendapat bahwa “Kinerja keuangan daerah adalah potensi daerah yang salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan 32 Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya dimana Kinerja keuangan juga suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturanaturan pelaksanaan keuangan secara baik dan

benar, dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standard dan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Sesuai Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyajikan laporan keuangan.

2.1.3 Keuangan Pemerintah daerah

Berdasarkan PP 12 tahun 2019 yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah

1. **Transparansi**, adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
2. **Akuntabilitas**, adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.

3. Value for money, berarti diterapkan

tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

- a. Ekonomi, pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik.
- b. Efisiensi, suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya.
- c. Efektifitas, hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai Pada tahun 2019, Pemerintah telah menerbitkan aturan baru tentang cara mengelola keuangan di daerah yang tertuang dalam PP 12 tahun 2019. Beberapa poin penting dalam revisi aturan Pengelolaan Keuangan Daerah yakni:
 1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sertamelakukan pinjaman
 2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
 3. Penerimaan Daerah
 4. Pengeluaran Daerah
 5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.
 6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

2.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah diartikan sebagai pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik yang dikelola oleh kabupaten/kota atau provinsi yang terdiri atas urusan wajib dan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang (Sasana, 2011).

Mahmudi (2019, 153) menjelaskan Belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun Akuntansi bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Macam – macam Belanja Daerah Belanja Daerah, terdiri atas :

- a. Belanja Tidak Langsung, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi hasil kepada propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa serta Belanja Tidak Terduga
- b. Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Namun dalam hal ini perlu dipahami bahwa belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah. Tidak semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah yang menyebabkan berkurangnya kas di rekening Kas Umum Daerah dikategorikan sebagai belanja. Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah

(Mahmudi, 2019:153).

Jenis-jenis Analisis Belanja Daerah terdapat 4 rasio yaitu :

1. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan Akuntansi. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan laporan Realisasi Akuntansi yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians Akuntansi belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Selisih Akuntansi belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: selisih disukai (*favourable variance*) dan selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari Akuntansinya maka disebut *favourable variance*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari Akuntansinya maka dikategorikan *unfavourable variance* (Mahmudi, 2019:155).

Rumus Analisis Varians Belanja Daerah:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah

diamanatkan dalam anggaran. (Mahmudi, 2019:155).

Ketika melakukan analisis varians anggaran, hendaknya tidak terpaku pada persentase penghematan yang berhasil dilakukan, tetapi juga jumlah nominalnya. Meskipun secara persentase kecil, tetapi jika secara nominal cukup signifikan, maka dapat dikatakan kinerjanya baik. Penyerapan anggaran yang terlalu rendah, misalnya dibawah 90% justru bisa jadi dinilai kurang baik, karena mengesankan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran misalnya adanya penggelembungan (*mark up*) belanja dari belanja wajarnya atau mungkin banyak program yang tidak dijalankan. Oleh karenanya untuk menghindari kejadian tersebut pemerintah perlu melakukan analisis standar belanja yang akurat (Mahmudi, 2019:157).

Secara normatif, anggaran belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilakukan. Kinerja pemerintah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Namun harus dikaji lebih lanjut apakah realisasi anggaran yang lebih kecil dari anggaran disebabkan karena kinerja yang baik (*good performance*) ataukah justru sebaliknya kinerja yang buruk (*bad performance*). Jika hal itu karena pengendalian anggaran yang ketat yang dilakukan pemerintah daerah, maka hal itu memang benar-benar merupakan prestasi. Tetapi jika tidak terserapnya anggaran belanja tersebut disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak

dilaksanakan atau karena penetapan harga satuan yang jauh melebihi nilai pasar, maka hal itu bukan menunjukkan kinerja anggaran yang baik, sehingga penghematan belanja yang ditampilkan merupakan prestasi yang semu. Namun itupun masih lebih baik daripada terjadi pemborosan anggaran, sebab penghematan anggaran tahun sekarang dapat digunakan untuk pembiayaan tahun berikutnya (Mahmudi, 2019:158)

2. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pertumbuhan belanja harus diikuti pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah (Mahmudi, 2019:158).

Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t - 1}$$

Apabila secara keseluruhan pertumbuhan belanja daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, untuk menilai apakah kenaikan tersebut masih dalam batas kewajaran atau tidak maka perlu dilihat berapa besarnya inflasi pada tahun tersebut, berapa tambahan cakupan pelayanan, berapa pertumbuhan penduduk, belanja apa yang paling besar mempengaruhi kenaikan pertumbuhan tersebut, apa alasan kenaikan belanja tersebut, apakah kenaikan belanja disebabkan karena faktor internal yang relatif terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang diluar kendali pemerintah (Mahmudi, 2019:160).

Jika dilihat dari perspektif pertumbuhan belanja, sistem anggaran berbasis kinerja berbeda dengan anggaran tradisional. Sistem anggaran tradisional memiliki karakteristik yaitu pos-pos anggarannya tetap (*line-item*) dan selalu meningkat setiap tahunnya (*incrementalism*), sehingga kecenderungannya setiap tahun akan terjadi kenaikan anggaran meskipun sebenarnya kenaikan tersebut tidak prioritas atau bahkan tidak diperlukan. Namun dengan digunakannya anggaran berbasis kinerja yang mana setiap anggaran harus dikaitkan dengan target kinerja, maka kecenderungan untuk terus meningkatkan anggaran tidak perlu terjadi. Pertumbuhan anggaran belanja tentu bisa saja negative atau lebih kecil dari tahun sebelumnya jika memang belanja tersebut tidak prioritas untuk tahun sekarang. Anggaran tertentu yang tidak menambah nilai bahkan bisa dihilangkan atau dipangkas dan dialihkan untuk belanja lain yang prioritasnya lebih penting. Prinsipnya pertumbuhan belanja harus terencana dan terkendali dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas

fiskal daerah terjaga (Mahmudi, 2019:160).

3. Analisis keserasian Belanja Daerah

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pengeluaran belanja modal yang dilakukan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Selain itu, belanja modal juga tidak bersifat rutin. Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah (Mahmudi, 2019:162).

Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah pada umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen. (Mahmudi, 2019:163). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanjadengan anggaran belanja.Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif.

Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapatmengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relative lebih efisiendibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2019:164).

Rasio Efisiensi Belanja Daerah Dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

5. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktifitas dan efektivitas belanja daerah.

$$\text{Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja daerah}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

2.1.4 Keuangan Pemerintah daerah

Berdasarkan PP 12 tahun 2019 yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah :

1. **Transparansi**, adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
2. **Akuntabilitas**, adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan di pertanggung jawabkan kepada DPRD.
3. **Value for money**, berarti diterapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.
 - a. **Ekonomi**, pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik.
 - b. **Efisiensi**, suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan

penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya.

c. Efektifitas, hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai Pada tahun 2019, Pemerintah telah menerbitkan aturan baru tentang cara mengelola keuangan di daerah yang tertuang dalam PP 12 tahun 2019. Beberapa poin penting dalam revisi aturan Pengelolaan Keuangan Daerah yakni:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan Daerah
4. Pengeluaran Daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya terkait dengan topik penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul	Variable	Hasil Penelitian
1.	Riska (2020)	Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo	<p>Variabel X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis varians Belanja Daerah 2. Analisis pertumbuhan belanja daerah 3. Analisis Keserasian belanja daerah 4. Rasio efesiensi belanja daerah <p>Variabel y: Kinerja anggaran belanja</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis varians belanja pada tahun 2017 dan tahun 2018 kinerja belanja dinilai baik serta, pada tahun 2019 kinerja belanja dinilai kurangbaik. Analisis pertumbuhan belanja menunjukan hasil bahwa pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2018- 2019 pertumbuhan belanja mengalami kenaikan. Berdasarkan analisis keserasian belanja yaitu rasiobelanja modal terhadap total belanja pada tahun 2017, serta pada tahun 2019 yaitu 28.67 % rasio belanja modalterhadap total belanja juga menunjukkan kinerja yang kurang baik.</p>
2.	Fatmawati,Desi. (2017)	Analisis Kinerja Belanja dalam LRA pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu	<p>Variabel X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Varians Belanja 2. Analisis PertumbuhanBelanja 3. Rasio Belanja Oprasional Terhadap Belanja Daerah 4. Rasio Belanja Modal Terhadap TotalBelanja 5. RasioEfesiensi Belanja <p>Variabel Y : Kinerja BelanjaBPKAD Rohul</p>	<p>Hasil kinerja Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dan Belanja Modal. Rata-rata Belanja Operasi 75,00% dan Belanja Modal 25,00%</p>
3.	Kristiani karlin ngkai (2021)	Analisis Kinerja Daerah dalam laporan realisasi anggaran (LRA)	<p>Variabel X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Varians Belanja 	<p>1. Analisis Varians Beljadan rasio efektivitas belanja menunjukkan realisasi</p>

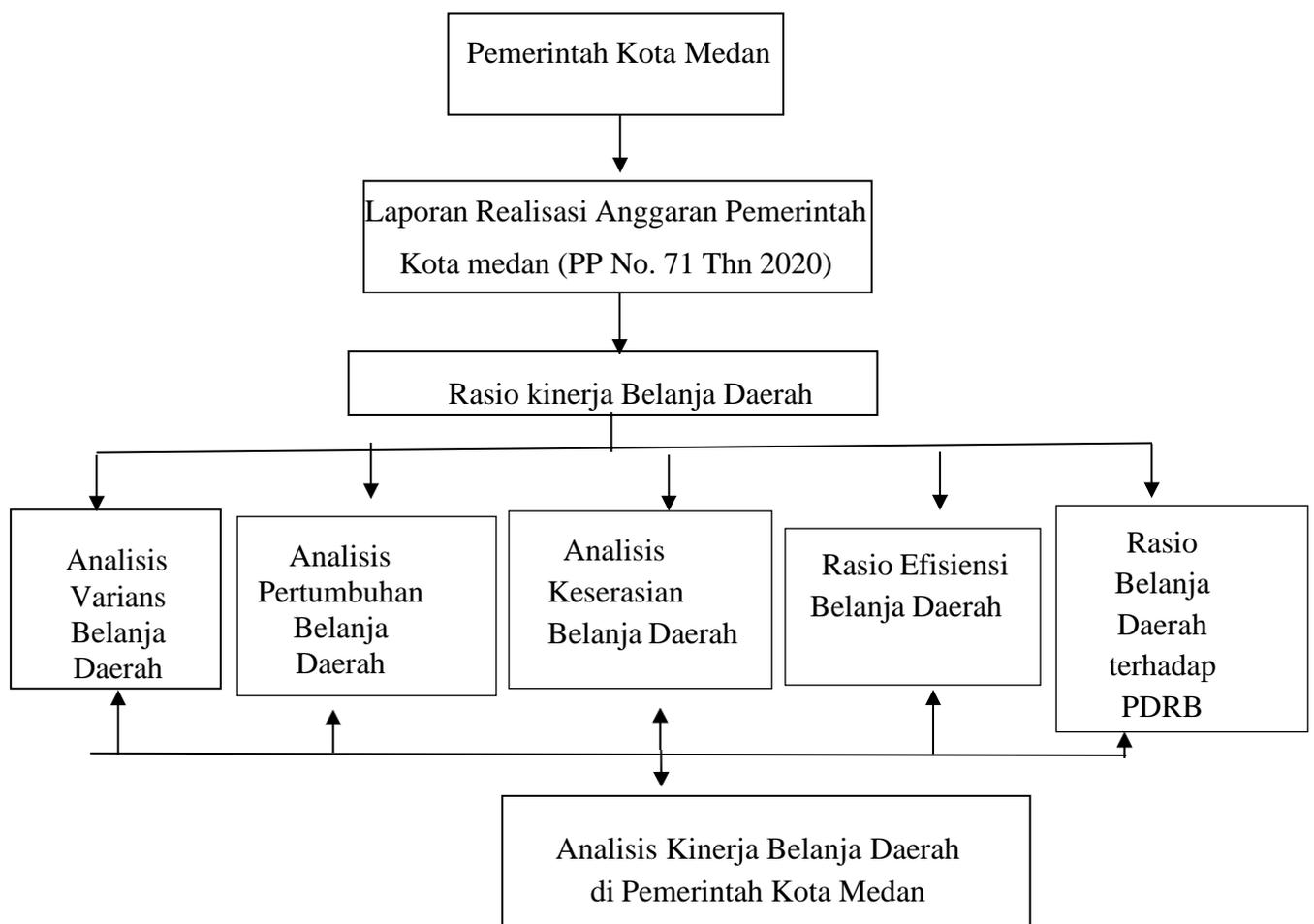
		Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Nusa Tenggara Timur	<p>2. Analisis Pertumbuhan Belanja</p> <p>3. Analisis Belanja operasional terhadap total belanja</p> <p>4. Rasio efisiensi belanja dan Analisis belanja modal terhadap total belanja</p> <p>Variabel Y: Kinerja Belanja pada Dinas Kominfo NTT</p>	<p>anggaran yang baik selama 5 (lima) tahun terakhir</p> <p>2. Analisis Pertumbuhan Belanja menunjukkan terjadinya pertumbuhan yang baik dari tahun ke tahun yang dinilai dari besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pembelanjaan daerah</p> <p>3. Analisis Belanja Operasional Terhadap Total Belanja dan Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja menunjukkan kurangnya optimalisasi terhadap pembagian anggaran untuk belanja operasional dan belanja modal, karena anggaran untuk belanja operasional jauh lebih besar dari anggaran untuk belanja modal.</p>
4.	Fransiskus X. W Katit dan Sherly Pinatik (2016)	Analisis Kinerja Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua	<p>Variabel X</p> <p>1. Analisis Varians Belanja</p> <p>2. Analisis pertumbuhan Belanja</p> <p>3. Analisis keserasian Belanja</p> <p>4. Analisis efisiensi Belanja</p> <p>Variabel Y: Kinerja Belanja pada Pemerintah daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua</p>	<p>Selama tahun 2013-2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat memanfaatkan anggaran belanja dengan baik dimana realisasi belanja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat lebih kecil dari Anggaran yang telah direncanakan. Dari beberapa analisis yang telah dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Asmat sudah menunjukan hasil yang positif dalam kinerja belanja. Namun pemerintah daerah lebih mempertimbangkan dimana belanja yang di dalamnya mengenai kepentingan umum harus lebih ditingkatkan.</p>

5.	Fika Widya Apriyanti, dkk. (2019)	Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kab. Serdang Bedagai	<p>Variabel X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis varians Belanja 2. Analisis Belanja operasi terhadap Total Belanja Daerah 3. Analisis Belanja modal terhadap total belanja daerah 4. Rasio efisiensi belanja <p>Variabel Y : Kinerja belanja</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terlihat dari realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari anggaran belanja dengan angka rata-rata persentase mencapai 93,84% yang menunjukkan hasil bahwa kinerja belanja dinilai baik dan menunjukkan bahwa adanya penghematan penggunaan penyerapan realisasi anggaran.</p>
6.	Satriyo Hendy Wibowo (2022)	Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan daerah di Kota Medan	<p>Variabel X</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB 2. Jumlah penduduk <p>Pendapatan per kapita</p>	<p>Menunjukkan Inflasi signifikan mempengaruhi PDRB dan PDRB signifikan mempengaruhi Penyerapan tenaga kerja. Nilai pengaruh langsung inflasi terhadap Penyerapan tenaga kerja lebih besar dari nilai tidak langsung inflasi terhadap Penyerapan tenaga kerja dengan PDRB. Maka dapat disimpulkan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan tenaga kerja dengan PDRB sebagai variabel intervening, atau dapat disimpulkan bahwa PDRB menjadi variabel yang memediasi antara Inflasi terhadap Penyerapan tenaga kerja maka PDRB tidak berfungsi sebagai variabel intervening</p>

2.3 Kerangka pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teori penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan dalam proses melakukan penilaian kinerja belanja daerah dapat dilakukan dengan beberapa analisis kinerja belanja pada belanja daerah. Analisis tersebut meliputi Analisis

Varians Belanja menggambarkan tingkat efisiensi atau penghematan anggaran pemerintah daerah terhadap efisiensi atau penghematan belanja daerah, analisis yang diinginkan dengan hasil selisih realisasi belanja yang tinggi. Terdapat Analisis Pertumbuhan memberikan informasi tentang besaran pertumbuhan belanja dalam tahun anggaran bersangkutan. Hasil yang diharapkan adalah pertumbuhan belanja positif yang terus meningkat. Terdapat Rasio Keserasian menganalisis belanja operasi dan belanja modal terhadap belanja. Rasio belanja operasi memberikan informasi kepada pihak luar mengenai belanja modal memberikan informasi porsi belanja daerah yang berbentuk tata letak investasi dalam belanja modal yang bersifat manfaat jangka menengah dan panjang. Pertumbuhan belanja yang terus meningkat merupakan rasio kewajaran yang diharapkan. Dan terdapat Rasio Efisiensi Belanja menggambarkan tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah dimana angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi tidak bersifat absolut melainkan relatif. Rasio yang diinginkan jika hasil rasio efisiensinya kurang dari 100%. Dan kinerja belanja diukur dari Rasio belanja daerah terhadap PDRB pada Pemerintah Kota Medan. Analisis tersebut menjelaskan mengenai kemampuan pemerintah Kota Medan dalam mengelola anggarannya atau bagaimana kinerja belanja daerah dalam satu tahun anggaran belanja daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah suatu metode analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data berupa angka-angka yang nantinya akan digunakan untuk memberikan gambaran sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai suatu keadaan. Data- data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data keuangan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2017-2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Menjelaskan tempat atau lokasi tersebut dilakukan. Lokasi penelitian ini sekaligus membatasi ruang lingkup penelitian tersebut (Notoatmodjo, 2018). Dalam penelitian kali ini penulis akan melakukan penelitian di Kantor Pemerintah Kota Medan yang beralamatkan Jl. Kapten Maulana Lubis No.2, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112, Indonesia.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Medan yang

beralamat di JalanKapten Maulana Lubis, Medan, Sumatera

Utara.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2022-2023																		
		Apr 2022	Mei 2022	Jun - Jul 2022	Agus 2022	Sep - Nov 2022	Des 2022	Jan-feb 2023	Mar -Jun 2023	Jun-April 2024										
1	Riset awal/pengajuan judul	■																		
2	Penyusunan Proposal		■																	
3	Bimbingan Proposal			■																
4	Seminar Proposal				■															
5	Perbaikan/Acc Proposal					■														
6	Pengolahan data							■												
7	Penyusunan Skripsi									■										
8	Bimbingan Skripsi											■								
9	Seminar Hasil												■							
10	Sidang Meja Hijau																			■

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan yang diberikan terhadap suatu variabel agar variabel dapat diukur menggunakan instrument atau alat ukur.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah kinerja yang dapat diartikan sebagai kegiatan/aktivitas yang dapat diukur dari suatu organisasi sebagai bagian dari pengukuran keberhasilan pekerjaan.

Sujarweni (2015:107) Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapaisasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Adapun variabel yang digunakan dalam penenelitian ini yaitu analisis anggaran belanja.. Kinerja anggaran belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) dapat diukur dengan menggunakan analisis kinerja belanja yakni:

Tabel 3. 2. Defenisi Operasional Variabel

NO.	Variabel	DefenisiVariabel	Indikator	skala
1.	Varians Belanja Daerah	Analisis Varians Belanja Daerah merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran Sumber : (Mahmudi, 2019:155.)	Analisis Varians Belanja daerah = Realisasi Belanja daerah – Anggaran Belanja daerah	Rasio
2.	Pertumbuhan Belanja Daerah	Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Merupakan analisis untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun (Sumber : Mahmudi, 2019:160.)	$\frac{\text{Realisasi Belanja Thn t} - \text{Realisasi Belanja Thn T-1}}{\text{Realisasi Belanja Thn t-1}} \times 100\%$	Rasio
3.	Keserasian Belanja Daerah	Analisis Keserasian Belanja Daerah merupakan analisis untuk mengetahui keseimbangan antar belanja dengan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah (Sumber : Mahmudi, 2019:162)	$\frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio

4.	Rasio efisiensi belanja daerah	Analisis efisiensi belanja daerah merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja Sumber : (Mahmudi, 2019:164)	$\frac{\text{Rasio Efisiensi Belanja daerah}}{\text{Anggaran Belanja daerah}} \times 100\%$	Rasio
5.	Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB	merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktifitas dan efektivitas belanja daerah.	$\frac{\text{Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB} = \text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$	Rasio

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, penulis lebih memfokuskan pada data kuantitatif dalam melakukan analisis ini. Jenis data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau perhitungan. Jenis data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan keuangan.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti yaitu Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019). Data sekunder diperoleh melalui sejarah perusahaan, literatur – literatur, serta buku-buku yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan sebagai bahan referensi untuk menyusun kajian pustaka atau teori – teori dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh berupa data mengenai sejarah, struktur organisasi dan laporan keuangan (laporan realisasi anggaran) Pemerintah Kota Medan dari tahun 2018– 2021.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Sugiyono (2017:224) menyimpulkan bahwa Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian yaitu mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang digunakan, maka peneliti tidak akan mungkin bisa untuk mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.

Berikut ini merupakan teknik dari pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Hernawati, 2017). Studi dokumentasi terhadap Analisa kinerja realisasi anggaran dalam belanja daerah Kota Medan. Dokumentasi berupa laporan realisasi anggaran dari Pemerintah Kota Medan selama tahun 2018-2021. Dokumentasi terkait seperti notulen meeting terkait realisasi anggaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

2. Studi Pustaka

Disamping itu dengan menggunakan studi pustaka (literature review), penulis dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi (Hernawati, 2017). Studi pustaka memuat beberapa sumber penelitian terdahulu sebagai bahanreferensi peneliti

meliputi jurnal, buku, dan pedoman kepenulisan dari kampus.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yakni dengan konsep anggaran khususnya analisis belanja. Analisis deskriptif adalah suatu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasi, mengklasifikasi, menafsirkan serta menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Analisis keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Menghitung data dengan menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efektivitas dan efisiensi belanja agar dapat diketahui peningkatan efisiensi dari masing-masing analisis dalam penganggaran belanja.
3. Menginterpretasikan data yang telah dihitung dengan menggunakan analisis untuk menggambarkan suatu masalah yang terjadi pada instansi tersebut.

4. Menyimpulkan masalah yang terjadi dari hasil perhitungan analisis untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah yang terjadi pada instansi tersebut. Adapun untuk mengetahui analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

1) Analisis Varians Belanja Daerah

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Tabel 3.3
Kriteria Varians Belanja Daerah

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Sumber : Purwaningsih, 2021

2) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t - 1} \times 100\%$$

Tabel 3.4
Kriteria penilaian kinerja pertumbuhan belanja

Kriteria	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber : Mahmudi, 2016

3) Analisis Keserasian Belanja Daerah

Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal thd Total Belanja} =$$

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4) Rasio Efisiensi Belanja Daerah

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Efisiensi Belanja Daerah} \\ &= \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\% \end{aligned}$$

Secara umum, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanjalangsung dengan target anggaran belanja langsung.

5) Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB

$$\frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Pemerintahan Kota Medan

Kampung kecil yang dalam masa kurang lebih 80 tahun dengan pesat berkembang menjadi kota yang dewasa kita dikenal sebagai Kota Medan, berada di suatu tanah datar, ditempat sungai Babura yang bertemu dengan sungai Deli, yang waktu itu dikenal sebagai “Medan Putri”, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang. Menurut Tengku Lukman Sinar, SH dalam bukunya “Riwayat Hampan Perak” yang terbit 1971, yang mendirikan kampung medan adalah Raja Guru Patimpus, nenek moyang Datuk Hampan Perak (Dua belas Kuta) dan Datuk Sukapiring, yaitu dua dari tempat Kepala Suku Kesultanan Deli. Deli mulai terkenal namanya setelah orang-orang Belanda yang dipelopori Neinhuis, membuka perkebunan tembakau di sekitar Medan. Dalam beberapa tahun saja deli terkenal di seluruh dunia karena dalam tembakau yang dihasilkannya tidak ada tandingan sampai sekarang sebagai daun pembungkus cerutu. Hal ini menarik investorinvestor asing dan menyebabkan banyak orang-orang dari daerah lain yang pindah ke daerah Deli untuk mencari nafkah. Neinhuis kemudian meninggalkan kantornya dari labuhan ke Medan Putri dari tempat mana Kota Medan berkembang pesat dan akhirnya menjadi pusat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Timur dan Kerjaan Deli. Di tahun 1981, Medan menjadikan Kotapraja, tetapi tidak

termasuk dalamnya daerah Kota Matsum dan daerah sungai Kera yang tetap berada di bawah kawasan Sultan Deli. Ketika itu penduduk Medan telah berjumlah 43,826 jiwa, dan terdiri dari 409 orang bangsa Eropa, 25.000 orang bangsa Indonesia 8.269 orang bangsa China dan 130 orang bangsa Asing lainnya. Kemudian melalui undang-undang darurat No. 7 dan tahun 1956, telah dibentuk di Provinsi Sumatera Utara daerah-daerah Tingakt II, antara lain Kabupaten Deli Serdang dan Kotamadya Medan. Perkembangan selanjutnya di Provinsi Sumatera Utara umumnya dan Kotamadya khususnya, memerlukan perluasan daerah untuk mampu menampung laju perkembangan. Oleh karena itu, maka dikeluarkannya peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1973 melalui nama dimasukkan beberapa bagian dari Kabupaten dan 116 Kelurahan dengan surat persetujuan Mendagri No. 140/2271/PUOD tanggal 05 Mei.

4.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Kota Medan

Kota Medan merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Medan ini adalah Kota terbesar di Pulau Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan adalah pintu gerbang wilayah Indonesia pada bagian barat dan juga termasuk sebagai pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata Brastagi di daerah daratan tinggi Karo, objek wisata Orang Utan di Bukit Lawang, Danau Toba. Kota Medan terletak antara 2°.27'-2°.47' Lintang Utara dan 98°.35'-98°.44' Bujur Timur. Kota Medan 2,5-3,75 meter di atas permukaan laut. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum berkisar antara 23,0°C-24,1 °C dan suhu maksimum berkisar antara 30,6 °C-33,1 °C serta pada malam hari berkisar 26°C-30,8°C. Selanjutnya mengenai kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 78%-82%. Sebagian

wilayah di Medan sangat dekat dengan wilayah laut yaitu pantai Barat Belawan dan daerah pedalaman yang tergolong dataran tinggi, seperti Kabupaten Karo. Akibatnya suhu di Kota Medan menjadi tergolong panas. Kecepatan angin rata-rata sebesar 0,42 m/sec sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 100,6 mm.

Batas wilayah Kota Medan Selatan : Pancur Batu, Deli Tua (Kabupaten Deli Serdang) Barat : Tanjung Morawa (Kabupaten Deli Serdang) Timur : Kota Binjai, Hamparan Perak (Kabupaten Deli Serdang).

Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan.

Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefinitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan. Berdasarkan perkembangan administratif ini Kota Medan kemudian tumbuh secara geografis, demografis dan sosial ekonomis.

4.1.3 Visi dan Misi Kota Medan

VISI :

Terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif.

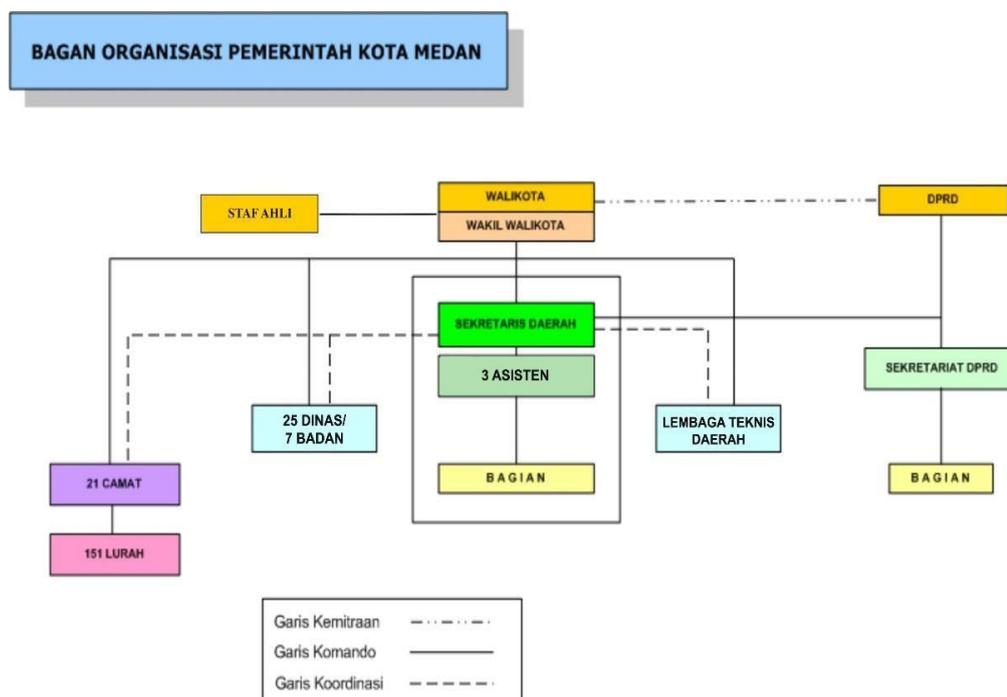
MISI :

- 1) Medan Berkah : Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat
- 2) Medan Maju : Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.
- 3) Medan Bersih : Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
- 4) Medan Membangun : Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim

kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.

- 5) Medan Kondusif : Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.
- 6) Medan Inovatif : Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital sosial budaya.
- 7) Medan Beridentitas : Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air

4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Medan



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kota Medan

Sumber : pemkomedan.go.id (2023)

Struktur Organisasi merupakan susunan yang terdiri dari fungsi-fungsi dan hubungan-hubungan yang menyatakan seluruh kegiatan untuk mencapai suatu sasaran. Secara fisik struktur organisasi dinyatakan dalam bentuk bagan yang memperlihatkan hubungan antara unit-unit organisasi dan garis-garis wewenang yang ada. Penggambaran organisasi dalam suatu bagan merupakan suatu hasil keputusan yang telah tercapai struktur organisasi yang bersangkutan. Sebelum menjalankan suatu aktivitas organisasi atau instansi sangatlah penting dalam membuat tata hubungan dari pada wewenang dan tugas masing-masing bagian organisasi atau instansi.

1. Sekretaris Daerah : Wiriya Alrahman

4.1.5 Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah sub bagian keuangan yang berfungsi mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat sub seksi dikarenakan pada saat itu wajib pajak atau wajib retribusi yang berdomisili di Kota Medan cukup banyak. Dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Medan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 sub bagian Keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Melalui bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak atau wajib retribusi dalam Daerah Kota Medan yang terdiri dari 21 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia,

Medan Sunggal, Medan Maimun, Medan Selayang, dan lainnya.

Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KUPD No. 7/12/41- 10 tentang penyegaran struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2009 tentang Menyesuaikan dan Membentuk Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru. Dalam Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan Daerah serta bagian Tata Usaha yang memiliki 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang merupakan sub sektor perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang memberikan kontribusi cukup penting bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah.

4.1.6 Penyajian Data

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, maka hasil analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Varians Belanja Daerah

Mahmudi (2019:155) mendefinisikan bahwa Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa

dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya.

Tabel 4.1 Analisis Varians Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2021

Tahun	Analisis Varians Belanja daerah				
	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Analisis Varians Belanja Daerah	Persentase	Kategori
2018	Rp. 4.215.003.353.126	Rp. 5.451.085.765.928	-Rp1.236.082.412.802	77,32%	Baik
2019	Rp. 5.060.725.686.081	Rp. 6.304.555.945.273	-Rp1.243.830.259.192	80,27%	Baik
2020	Rp. 3.854.742.410.737	Rp. 5.254.667.074.400	-Rp1.399.924.663.663	73,35%	Baik
2021	Rp. 4.499.145.144.312	Rp. 5.731.395.062.275	-Rp1.232.249.917.963	78,50%	Baik

Sumber: Data diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.1, analisis varians belanja daerah Kota Medan pada tahun 2018 hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa realisasi belanja tidak melebihi anggaran belanja sehingga dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2018 yang menunjukkan nilai realisasi belanja sebesar Rp 4.215.003.353.126 memiliki selisih sebesar Rp. 1.236.082.412.802 dengan persentase selisih sebesar 77,32%. Sama halnya tahun 2019 memiliki nilai realisasi belanja sebesar Rp 5.060.725.686.081 memiliki selisih sebesar Rp. 1.243.830.259.192 dengan persentase selisih sebesar 80,27%. Ditahun 2020 memiliki nilai realisasi belanja sebesar Rp 3.854.742.410.737 memiliki selisih sebesar Rp. 1.399.924.663.663 dengan persentase selisih sebesar 70,35%.. Pada tahun 2021 nilai realisasi belanja sebesar Rp 4.499.145.144.312 memiliki selisih sebesar Rp. 1.232.249.917.963 dengan persentase selisih sebesar 78,50%

2. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Mahmudi (2019:158) mendefinsikan bahwa Analisis

pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 4.2 Analisis Pertumbuhan Belanja Kota Medan
Tahun Anggaran 2018-2021**

Uraian	Realisasi Belanja Tahun t (Rp)	Realisasi Belanja Tahun t-1 (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Persentase (%)	Kategori
2018-2019	Rp.5.060.725.686.081	Rp. 4.215.003.353.126	Rp.845.722.332.955	-20,06 %	Negatif
2019-2020	Rp.3.854.742.410.737	Rp. 5. 060.725.686.081	Rp. 1.205.983.275.344	-23,83%	Negatif
2020-2021	Rp.4.499.145.144.312	Rp. 3.854.742.410.737	Rp. 644.402.733.575	-16,71%	Negatif

Sumber: Data diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.2 analisis pertumbuhan belanja daerah Kota Medan menunjukkan pertumbuhan belanja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah Rp. 845.722.332.955 lalu dari tahun 2019 sampai tahun 2020 adalah Rp. 1.205.983.275.344 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja kota Medan lebih kecil dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2020- 2021 adalah Rp. 644.402.733.575 mengalami kenaikan kembali artinya lebih besar dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari laporan realisasi belanja anggaran pada tahun 2020 lebih kecil dibandingkan tahun 2021.

3. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Mahmudi (2019:162) menyatakan bahwa untuk mengetahui keseimbangan antar belanja maka perlu yang namanya analisis keserasian belanja. Hal ini berkaitan dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja agar fungsi anggaran dapat berjalan baik. Rasio keserasian dapat diukur dengan menggunakan rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja.

Tabel 4.3 Analisis Keserasian Belanja daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2021

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Ratio (%)
2018	Rp. 753.996.886.210	Rp. 4.215.003.353.126	17,88
2019	Rp. 992.661.245.695	Rp. 5.060.725.686.081	19,61
2020	Rp. 308.278.278.057	Rp. 3.854.742.410.737	7,99
2021	Rp. 574.604.617.139	Rp. 4.499.145.144.312	12,77

Sumber: Data diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.3, rasio belanja modal terhadap total belanja menunjukkan persentase tingkat belanja modal terhadap total belanja daerah pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Tingkat belanja modal terhadap total belanja daerah paling rendah terjadi pada tahun 2020, sedangkan tingkat belanja modal terhadap total belanja paling tinggi terjadi pada tahun 2019. Halini dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran yang menunjukkan nilai realisasi belanja modal pada tahun 2018 sebesar Rp 753,996,886,210, pada tahun 2019 sebesar Rp 992,661,245,695, pada tahun 2020 sebesar Rp 308,278,278,057 dan pada tahun 2021 sebesar Rp

574,604,617,139 dari total belanja daerah.

4. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Mahmudi (2019:164) menyatakan bahwa rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan tidak absolut, tetapi relatif. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini.

**Tabel 4.4 Rasio Efisiensi Belanja Kota Medan
Tahun Anggaran 2018-2021**

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kategori
2018	Rp. 4.215.003.353.126	Rp. 5.451.085.765.928	77,32%	Efisien
2019	Rp. 5.060.725.686.081	Rp. 6.304.555.945.273	80,27%	Cukup Efisien
2020	Rp. 3.854.742.410.737	Rp. 5.254.667.074.400	73,35%	Efisien
2021	Rp. 4.499.145.144.312	Rp. 5.731.395.062.275	78,5%	Efisien

Sumber: Data diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.4, Rasio efisiensi belanja daerah Kota Medan pada tahun 2018 yang menunjukkan nilai anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 1.919.808.866.246,00 lebih besar dari realisasi yaitu Rp 1.738.114.313.666,49, belanja langsung menunjukkan nilai anggaran sebesar Rp 3.531.276.899.682,00 lebih besar dari realisasi yaitu Rp 2.476.889.039.459,75. Secara keseluruhan realisasi belanja masih lebih kecil dari anggaran belanja atau dibawah 100%.

Tahun 2019 nilai anggaran belanja sebesar Rp 6.304.555.945.273,05 lebih besar dari realisasi yaitu Rp 5.060.725.686.081,01, belanja modal menunjukkan nilai anggaran sebesar Rp 1.300.255.956.255,19 lebih besar dari realisasi yaitu Rp 992.661.245.694,74, kemudian belanja tak langsung menunjukkan nilai anggaran sebesar Rp 2.369.023.202.529,05 lebih besar dari realisasi yaitu Rp 2.048.362.648.247,63. Sama halnya tahun 2020, pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pemerintah Kota Medan telah melakukan efisiensi anggaran karena secara keseluruhan realisasi anggaran belanja masih lebih kecil dari anggaran belanja atau dibawah 100%. Hal yang sama juga dilakukan pada tahun 2021 dimana rasio efisiensi belanja masih dibawah 100%.

5. Rasio Kinerja Belanja Daerah terhadap PDRB

Rasio ini membandingkan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Manfaat rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Berdasarkan hasil analisis rasio belanja daerah terhadap PDRB di dapatkan hasil sebagai berikut pada tahun 2018 menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja adalah 2,84% dengan PDRB sebesar Rp. 148,007,140,000,000. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja adalah 80,27% dengan PRDB sebesar Rp 148,007,140,000,000. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja adalah 73,35 dengan PDRB sebesar Rp 156,780,580,000,000. Pada tahun 2021 menunjukkan bahwa rasio

efisiensi belanja adalah 78,5 dengan PDRB sebesar Rp .
153,669,830,000,000.

Tabel 4.5 Rasio Kinerja Belanja Daerah Terhadap PDRB

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Total PDRB	Rasio belanja terhadap PDRB
2018	Rp. 4.215.003.353.126	Rp. 148,007,140,000,000	2,84 %
2019	Rp. 5.060.725.686.081	Rp. 148,007,140,000,000	3,41%
2020	Rp. 3.854.742.410.737	Rp. 156,780,580,000,000	2,45&
2021	Rp. 4.499.145.144.312	Rp. 153,669,830,000,000	2,92%

Sumber: Data diolah Penulis (2023)

Dari tabel 4.5, menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja fluktuatif dari tahun 2018-2021, sedangkan PDRB dari tahun 2018-2021 mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan Rasio Efisiensi Belanja dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan). Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio yang cenderung fluktuatif mengikuti nilai realisasi belanja.

4.2 Pembahasan

1. Kinerja Belanja Daerah diukur dari varians Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Medan

Analisis varians belanja cukup sederhana namun memberikan informasi yang sangat berarti. Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Berdasarkan table 4.1 dapat diketahui bahwa perhitungan selisih anggaran berdasarkan Varians Belanja daerah pada Pemerintah kota Medan pada

tahun 2018 sebesar 77,32%. Tahun terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 80,27% sedangkan pada tahun 2020 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan Varians Belanja daerah dibandingkan tahun 2019 terjadi penurunan sekitar 73,35% Kemudian pada tahun 2021 penggunaan anggaran berdasarkan Varians Belanja daerah mengalami kenaikan Kembali sebesar 78,50%.

Jika dilihat dari realisasi belanja daerah dan anggaran ditahun 2019 Pemerintah Kota Medan memiliki SILPA yang cukup besar, maka Pemerintah Kota Medan mengambil kebijakan dalam Rencana Penyusunan Anggaran (RPA) untuk menurunkan anggaran ditahun 2020 dari tahun 2019 dikarenakan adanya pengurangan porsi belanja. Dan terjadinya kenaikan anggaran yang cukup signifikan di tahun 2021 dikarenakan terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang sudah mewabah yang dimana Pemerintah Kota Medan merealisasikan anggaran belanjanya untuk membantu masyarakat kota Medan dalam bentuk sandang, pangan, maupun papan dan belanja kebutuhan Kesehatan.

Varians belanja dari tahun 2019-2021 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan untuk mengetahui realisasi belanja daerah tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan sehingga kinerja anggaran belanja Kota Medan dinilai baik pada tahun 2018-2021.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Riska (2020), analisis varians belanja menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih besar dari pada anggaran belanja, terlihat bahwa adanya kinerja anggaran yang

kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran yang menunjukkan Kinerja Belanja Daerah diukur dari Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Medan.

2. Kinerja Belanja Daerah diukur dari Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan belanja yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun, maka hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 pertumbuhan belanja mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 pertumbuhan belanja mengalami penurunan yaitu 20,06%, atau pertumbuhan belanja tahun 2018 dan 2019 bernilai negatif. Pada tahun 2020 juga terjadi penurunan sebesar 23,83% yang pertumbuhan belanja tahun tersebut juga termasuk negatif. Hal ini disebabkan dampak dari pandemi Covid-19 sebagai upaya lanjutan dalam pencegahan merebaknya wabah pandemi Covid-19 sehingga banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan sosialisasi Dari Pemerintah Kota Medan dan adanya pengurangan penggunaan anggaran di beberapa pos-pos belanja, selain itu anggaran belanja juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa pada tahun tersebut pemerintah Kota Medan belum mampu meningkatkan daerahnya.

Sementara, realisasi anggaran tahun 2019 lebih besar dari tahun 2018 yang bernilai negatif, Sedangkan pada tahun 2021 realisasi anggaran juga bernilai negatif dengan nilai pertumbuhan belanja tahun 2021

sebesar 16,71%. Hal ini berarti bahwa pemerintah Kota Medan telah mampu meningkatkan pertumbuhannya dari tahun sebelumnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Riska (2020) yang menunjukkan hasil Kabupaten Wajo pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan anggaran atau pertumbuhan negatif artinya pemerintah daerah belum mampu meningkatkan daerahnya, sedangkan pada tahun 2015-2016 mengalami kenaikan anggaran atau pertumbuhan positif. Hasil yang berbeda tiap tahunnya dan pada akhir periode tahun penelitian yaitu 2021 yaitu Pemerintah Kota Medan mengalami pertumbuhan positif artinya Pemerintah Kota Medan dalam mengelola pengeluaran/belanja daerah dikatakan cukup baik dalam merealisasikan belanja daerahnya.

3. Kinerja Belanja Daerah diukur dari Keserasian Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan hasil analisis keserasian belanja yaitu Rasio belanja modal terhadap total belanja yang dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Belanja modal sangat penting untuk kebutuhan belanja pemerintah daerah. Belanja modal dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara menambah aset atau kekayaan daerah serta agar dapat menambah belanja yang bersifat rutin.

Belanja modal itu berpengaruh penting bagi pembangunan daerah untuk melihat kondisi kota medan Adapun jenis-jenis belanja modal yaitu Belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin belanja modal

Gedung dan bangunan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya, maka pada tahun 2018 menunjukkan rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 17,88%. Hal ini juga terjadi pada periode tahun 2019 menunjukkan rasio belanjamodal terhadap total belanja sebesar 19,61% ,sedangkan tahun 2020 sebesar 7,99%, dan 2021 sebesar 12,77%. Maka hal ini menunjukkan adanya kinerja yang baik karena masih berada dalam proporsi belanja yaitu antara 5- 20%. Bahwa selama tahun 2018-2021 Pemerintah kota Medan tidak terlalu giat melakukan investasi, Adapun investasi yang dilakukan kurang meningkatkan sebagai pendapatan seperti pembangunan di daerah kota Medan yaitu lampu pocong yang kurang efisien dan tidak dapat menjadi pendapatan sebagai jangka Panjang untuk memenuhi asetnya. Melainkan hanya untuk memenuhi operasional anggaran belanja dasar saja seperti belanja modal langsung dan belanja tidak langsung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Riska (2020) yang menunjukkan hasil rasio belanja modal pada Kabupaten Wajo masih berfluktuasi, dan konsisten dibawah 20% dari tahun 2014-2017, hal ini disebabkan karena dinas lebih berorientasi pada belanja operasi. Tidak berkeinginan untuk belanja modal dalam investasi jangka panjang. Selain itu, bagi daerah yang tidak berkeinginan untuk belanja modalnya diserap kedalam bentuk investasi jangka panjang, menunjukkan bahwa Kota Tersebut sudah memiliki aset berupa modal yang mencukupi. Sehingga biaya belanja modal hanya dikeluarkan untuk kegiatan operasional tahunan saja.

4. Kinerja Belanja Daerah diukur dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi belanja yang dilakukan untuk mengetahui perbandingan realisasi belanja dengan anggaran belanja, maka pada tahun 2018 menunjukkan tingkat efisien penggunaan belanja adalah sebesar 77,32%, hal ini menunjukkan adanya penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah karena tidak melebihi dari 100% maka termasuk dalam kategori efisien. Kemudian pada tahun 2019 menunjukkan tingkat efisien penggunaan anggaran sebesar 80,27% yang dapat dikatakan cukup efisien, sama halnya pada tahun 2019 pemerintah telah melakukan penghematan anggaran namun pada tahun 2018 pemerintah Kota Medan lebih efisien dari tahun sesudahnya. Sedangkan pada tahun 2020 rasio efisiensi belanja menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran tetap dibawah 100% yaitu sebesar 73,35% yang termasuk dalam kategori efisien. Hal ini menunjukkan pada tahun 2020, pemerintah kota Medan lebih hemat dalam menggunakan anggaran belanja dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 juga terlihat efisiensi anggaran belanja tetap dibawah 100%.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Grace Yunita Liando dan Ingriani Elim (2016) yang menunjukkan hasil dari daerah Kabupaten Wajo pada tahun 2013-2017 memiliki rasio dibawah 100% secara konsisten hal ini disimpulkan dapat melakukan penghematan anggaran karena realisasi anggaran belanja tidak ada yang melebihi jumlah yang telah dianggarkan. Hal ini sesuai dengan penelitian ini yang

menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja secara konsisten. Begitupun dengan penelitian Palimbongan (2019) yang menunjukkan hasil kinerja Badan Pengelola Keuangan Kota Tomohon tahun 2013-2017 telah melakukan efisiensi belanja atau tidak terjadi pemborosan anggaran dalam penggunaan anggaran.

5. Kinerja Belanja diukur dari Analisis Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB Pada Pemerintah Kota Medan

Rasio belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan produk domestik regional bruto (PDRB) yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Berdasarkan hasil uji pengaruh antara rasio belanja daerah terhadap PDRB menunjukkan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan), ini membuktikan bahwa secara otomatis utang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan tidak langsung merangsang peningkatan pendapatan daerah karena dalam menumbuhkan investasi atau pusat pertumbuhan itu melalui dengan memperbaiki infrastruktur pemerintah berupa belanja yang efeknya ke pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data tahun 2018-2021 nilai rasio belanja daerah mengalami fluktuasi. Sedangkan nilai PDRB kota Medan dari tahun 2018-2021 mengalami kenaikan yang konsisten. PDRB kota Medan cenderung bertumbuh dari tahun ke tahun.

Penelitian sejalan dengan penelitian Satriyo (2022) PDRB

menunjukkan Inflasi signifikan mempengaruhi PDRB dan PDRB signifikan mempengaruhi Penyerapan tenaga kerja. Nilai pengaruh langsung inflasi terhadap Penyerapan tenaga kerja lebih besar dari nilai tidak langsung inflasi terhadap Penyerapan tenaga kerja dengan PDRB

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja belanja daerah di Pemerintah Kota Medan jika dilihat dari Analisis varians belanja selama tahun 2018-2021 secara umum dapat dikatakan baik. Artinya realisasi Pemerintah Kota Medan tidak melebihi anggaran yang diberikan
2. Kinerja belanja daerah di Pemerintah Kota Medan jika dilihat dari Analisis pertumbuhan belanja selama tahun 2018-2019 secara umum mengalami pertumbuhan negatif Dan pada pada tahun 2020-2021 mengalami pertumbuhan positif. Artinya pertumbuhan belanja dari tahun 2018- 2021 mengalami fluktuasi.
3. Kinerja belanja daerah di Pemerintah Kota Medan diukur dengan Analisis keserasian belanja yang terdiri dari pada belanja modal, memproporsionalkan dalam pengalokasian belanjanya dengan mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal, sebab belanja modal juga diperlukan untuk peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan untuk menunjang program-program dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
4. Kinerja belanja daerah diPemerintah Kota Medan Berdasarkan Rasio

efisiensi belanja secara keseluruhan pada tahun 2018-2021 menunjukkan adanya penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah Kota Medan karena tidak melebihi dari 100%.

5. Kinerja belanja daerah Pemerintah Kota Medan menunjukkan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan). Hal ini dikarenakan nilai PDRB kota Medan dari tahun 2018-2021 selalu mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2021.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Menilai Kinerja Belanja daerah Pemerintah Kota Medan hendaknya menekankan angka selisih antara anggaran belanja dengan realisasi belanja. Karena semakin kecil selisih antara anggaran belanja dengan realisasi belanja menandakan bahwa pemerintah umumnya telah memanfaatkan APBD dengan baik
2. Untuk Menilai Kinerja Belanja daerah Pemerintah Kota Medan yaitu kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja daerah, Pemerintah Kota Medan hendaknya meningkatkan lagi pertumbuhan belanja khususnya pada masa pandemi Covid-19. Dikarenakan demi menjaga kestabilan ekonomi serta meningkatkan daya beli masyarakat Kota Medan, pemerintah harus membantu perekonomian dengan mengencangkan pada belanja bantuan sosial serta belanja tak terduga.
3. Untuk Menilai Kinerja Belanja daerah Pemerintah Kota Medan dalam

keseerasian belanja daerah diharapkan lebih memperhatikan realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja dan mempertahankan kinerja belanja yang sudah baik dan tidak melebihi proporsi belanja.

4. Untuk Menilai Kinerja Belanja daerah Pemerintah Kota Medan harus mempertahankan serta meningkatkan kinerja belanja yang sudah baik. Dikarenakan realisasi anggaran belanja selama ini tidak pernah melebihi anggaran yang dianggarkan. Sehingga Pemerintah Kota Medan senantiasa harus mempertahankan dan juga meningkatkan efisiensi dan keefektifannya dalam membelanjakan anggaran negara.
5. Untuk Menilai Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan lebih Memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, Herabudin, & Saodah, Siti. 2018. Analisis Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Garut. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. Vol.10(2).
- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Apriyanti, F. W., Tiara, S., & Dewi, R. S. 2019. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* Vol. 2, No. 2.
- Badan Pusat Statistik. 2022.*Kota Medan dalam angka*. Kota Medan.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Halim, A., dan Kusufi, M.S. 2016.*Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Hasanah, Nur & Vidiyastutik, Elok Dwi. 2018. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. *Jurnal Ecobuss*. Vol.6(1)
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Katit, F. X., & Pinatik, S. 2016. Analisis Kinerja Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol.4(3).
- Lantowa, Felmi D & Machmud, Joice. 2020. Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol.9(1).

- Liando, G. Y., & Elim, I. 2016. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4(1).
- Mahmudi. 2015. *Manajemen kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM
- Mahsun, Moh,et.all. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta..
- Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 5(2).
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Palimbongan, Remy R I. 2019. Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*. Vol.7(4)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 03 tentang *Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas*. Fokusindo Mandiri: Bandung.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.

- Rampengan, M. 2016. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16(3).
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekulilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Ratmono, D., dan Sholohin, M. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
- Ratnasari, W., & Munawaroh, S. 2019. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau. *Jemma/ Journal of Economic, Management and Accounting*, Vol. 2(1).
- Riska. 2020. Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sartika, Dewi. 2018. Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Sajow, C., Morasa, J., & Wokas, H. R. 2017. Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon Dan Pemerintah Kabupaten
- Setiani, T., & Madila, R. N. 2020. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009- 2018.

- Suartini, S. 2019. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Khusus Kelurahan (Akk) 2016-2017 Studi Kasus (Kelurahan Adiarsa Barat Kabupaten Karawang). *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6(2).
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press : Yogyakarta.
- Tantri, S. N., & Irmawati, P. 2018. Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2016. *Jati:Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 1(1).
- Tulangow, A. P., & Runtu, T. 2016. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA:Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4(3).
- Ulum, Ihyaul. 2012. *Audit Sektor Publik*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Wiranda, Dara Gendis. 2021. Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Periode 2016-2020. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.